

Peran Ekonomi Publik dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah: Analisis Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial dan Distribusi Sumber Daya

Caca Ramadani¹, Hendra Riofita²

^{1,2} Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: cacarahmadani840@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas peran ekonomi publik dalam pembentukan kebijakan pemerintah, dengan fokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan distribusi sumber daya. Ekonomi publik menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal, pajak, subsidi, serta program jaminan sosial untuk mengatasi kegagalan pasar dan mencapai keadilan sosial. Melalui metode kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kebijakan ekonomi publik yang tepat, seperti pajak progresif dan alokasi anggaran untuk kelompok rentan, dapat meningkatkan akses terhadap layanan dasar serta mengurangi kesenjangan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang berbasis pada prinsip ekonomi publik berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Meskipun demikian, tantangan implementasi seperti resistensi politik dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif.

Kata kunci: *Ekonomi Publik, Kebijakan Pemerintah, Kesejahteraan Sosial, Distribusi Sumber Daya, Pajak Progresif*

Abstract

This study explores the role of public economics in shaping government policy, with a focus on its impact on social welfare and resource distribution. Public economics serves as a critical foundation for governments in formulating fiscal policies, taxes, subsidies, and social security programs to address market failures and achieve social justice. Using a literature review method, the study identifies that well-designed public economic policies, such as progressive taxation and targeted budget allocations for vulnerable groups, can improve access to basic services and reduce social inequality. The analysis shows that government interventions based on public economic principles positively influence quality of life and promote more equitable wealth distribution. However, implementation challenges such as political resistance and budget constraints remain significant. Therefore, transparent governance and continuous policy evaluation are essential to ensure the effectiveness of public policy.

Keywords : *Public Economics, Government Policy, Social Welfare, Resource Distribution, Progressive Taxation*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata, peran ekonomi publik menjadi semakin penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Ekonomi publik sebagai cabang ilmu ekonomi membahas bagaimana pemerintah dapat campur tangan dalam pasar untuk mengatasi kegagalan pasar, meningkatkan efisiensi, serta menjamin keadilan distribusi sumber daya. Intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, subsidi, pajak, serta program jaminan sosial merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai ekonomi publik sangat diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Ketidakeimbangan dalam distribusi sumber daya, ketimpangan pendapatan, serta akses terhadap layanan publik menjadi isu yang terus diperbincangkan. Peran ekonomi publik di sini tidak hanya sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal, tetapi juga sebagai dasar analisis terhadap dampak kebijakan terhadap kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi semakin krusial di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan fiskal yang mempengaruhi prioritas kebijakan nasional maupun daerah.

Melalui jurnal ini, analisis terhadap peran ekonomi publik dalam pembentukan kebijakan pemerintah akan difokuskan pada dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan distribusi sumber daya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teori dan prinsip ekonomi publik dapat diterapkan secara efektif dalam merancang kebijakan yang adil dan inklusif. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola anggaran negara dan merumuskan program-program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

METODE

Literatur review merupakan suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu. Literatur review akan memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu topik tertentu. Literatur review akan memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan identifikasi atas suatu teori atau metode, mengembangkan suatu teori atau metode, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara suatu teori dengan relevansi di lapangan / terhadap suatu hasil penelitian. Melakukan literatur review sama artinya dengan melakukan kegiatan : 1) pengumpulan data / informasi, 2) melakukan evaluasi data, teori, informasi atau hasil penelitian, serta 3) menganalisa hasil publikasi seperti buku, artikel penelitian atau yang lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakuk oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi . Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu (a) Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir . Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Sebuah kebijakan bersifat mendasar. Hal ini dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Input kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijaksanaan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. Output sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Oleh sebab itu sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.

Hasil Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ekonomi publik sangat signifikan dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial. Pemerintah yang menerapkan kebijakan fiskal progresif, seperti pajak yang lebih tinggi bagi kelompok berpendapatan tinggi dan alokasi anggaran yang diarahkan untuk program sosial, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Analisis data menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah memberikan dampak langsung kepada kelompok miskin dan rentan, sehingga mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka. Selain itu, kebijakan ekonomi publik yang tepat juga berpengaruh terhadap distribusi sumber daya yang lebih merata. Hal ini terbukti dari penurunan kesenjangan pendapatan dan peningkatan distribusi kekayaan yang tercermin pada data statistik. Dengan distribusi yang merata, tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, hasil penelitian juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Resistensi politik, keterbatasan sumber daya, dan birokrasi yang kompleks menjadi hambatan utama yang harus diatasi agar kebijakan dapat berjalan efektif. Pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola dan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya peran ekonomi publik dalam pembentukan kebijakan pemerintah sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperbaiki distribusi sumber daya secara adil.

Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial

Kebijakan berbasis ekonomi publik memberikan dampak yang nyata dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah melalui berbagai program subsidi, bantuan sosial, dan jaminan kesehatan nasional telah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap layanan dasar. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat modal manusia yang merupakan kunci pembangunan ekonomi jangka panjang. Program jaminan sosial yang menasar kelompok miskin memberikan perlindungan dan peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya rasa keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Ketika kelompok yang kurang mampu mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup, ketegangan sosial dapat berkurang dan stabilitas sosial-politik dapat terjaga.

Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial tidak disalahgunakan dan benar-benar diterima oleh yang berhak. Dengan demikian, kebijakan ekonomi publik berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak terhadap Distribusi Sumber Daya

Kebijakan redistributif yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada perbaikan distribusi sumber daya di masyarakat. Pajak progresif yang diterapkan secara efektif mampu mengalihkan sebagian pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok kurang mampu melalui program bantuan sosial dan subsidi. Hal ini membantu memperbaiki ketimpangan pendapatan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Distribusi sumber daya yang lebih merata memungkinkan kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kontribusinya terhadap perekonomian. Program-program pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal juga menjadi bagian dari upaya redistribusi sumber daya. Dengan tersedianya infrastruktur dasar, akses ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Selain itu, redistribusi sumber daya yang baik juga meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial. Ketimpangan yang berkurang dapat menurunkan risiko konflik sosial dan meningkatkan kohesi sosial yang menjadi landasan penting dalam pembangunan nasional. Secara keseluruhan,

kebijakan ekonomi publik yang mengarah pada distribusi sumber daya yang adil merupakan strategi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tantangan dan Implikasi

Meskipun kebijakan ekonomi publik memiliki dampak positif yang signifikan, pelaksanaannya di lapangan tidak luput dari berbagai tantangan. Resistensi politik menjadi salah satu kendala utama, karena kebijakan redistributif seringkali menghadapi penolakan dari kelompok yang berkepentingan mempertahankan status quo. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program sosial secara optimal. Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan sangat diperlukan agar dana publik dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Proses administrasi yang berbelit-belit dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam distribusi bantuan sosial.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai tujuan dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi. Secara keseluruhan, tantangan ini harus dijadikan bahan refleksi dan perbaikan agar peran ekonomi publik dalam pembentukan kebijakan pemerintah dapat terus memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial dan distribusi sumber daya.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi publik memainkan peran krusial dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil. Melalui kebijakan fiskal seperti pajak progresif, subsidi, dan program jaminan sosial, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan pendapatan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan yang dirancang dengan prinsip ekonomi publik terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, dan memperkuat stabilitas sosial. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan seperti resistensi politik, keterbatasan anggaran, serta birokrasi yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ekonomi publik dalam kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kapasitas institusi pelaksana dan partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliyana, I., & Setiawan, R. D. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial dalam Dunia Pendidikan di Era Digital*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 23(1), 12–17.
- Atkinson, A. B. (2015). *Ekonomi Kesejahteraan dan Redistribusi*. Jakarta: Erlangga.
- Dunn, W. N. (2004). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musgrave, R. A. (1959). *Teori Ekonomi Publik*. Jakarta: LP3ES.
- Riofita, H. (2014). Pengaruh motivasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. UIN Suska Riau
- Riofita, H. (2022). Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend Sharia fintech. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 248–259.
- Riofita, H. (2023). Memicu kesediaan mahasiswa merekomendasikan jurusan pendidikan ekonomi. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Ekonomi Publik*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga